

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), Kepala Daerah merupakan amanah Undang-Undang, yakni Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat tentang : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), 3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. Capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Tahun 2018 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 6).

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi jangka panjang yang akan dicapai dalam periode tahun 2005-2025 adalah "*Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian*". Visi ini mengandung cita-cita dan semangat segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kapasitas daerah pada aspek kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam rangka pencapaian visi RPJPD Tahun 2005-2025, periodisasi RPJPD dibagi menjadi 4 (empat) tahapan jangka menengah, yaitu periode pertama (2005-2009), periode kedua (2010-2014), periode ketiga (2015-2020), dan periode keempat (2021-2025).

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

- ❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat
Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.
Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.
- ❖ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera
Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari

segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi.

**Tabel I.1.
Perumusan Misi**

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional

		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
--	--	---	---

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis

Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dengan persiapan yang baik diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang rawan bencana.

Salah satu modal kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi. Pemerintah Kabupaten mendorong penguatan modal sosial melalui peningkatan pengamalan agama dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. Seterusnya Pemkab juga akan mendorong penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat, penguatan sistem demokrasi, politik, serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta kesadaran hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.

Perumusan tujuan dan sasaran sebagai turunan dari misi ini mempertimbangkan sasaran pokok misi-misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

➤ Misi 1 :

- Mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
- Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
- Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
- Meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

➤ Misi 2

- Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
 - Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
 - Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Kabupaten Banjarnegara;
 - Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari segala tindak kejahatan.
- Misi 3
- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
 - Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat komitmen untuk menciptakan *good and clean government*. Fokus peningkatan dilakukan pada peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan masyarakat akan lebih bangga dengan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang profesional. Untuk mewujudkannya akan dilakukan dengan cara:

- a. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Penguatan sistem budaya kerja aparatur pemerintah yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik
- c. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan sesuai SPM pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung LPE, kemiskinan dan pengurangan pengangguran

Perumusan tujuan dan sasaran sebagai turunan dari misi ini mempertimbangkan sasaran pokok misi-misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- Misi 3
- Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

- Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Pengembangan sektor pertanian difokuskan terhadap pengembangan agroindustri dan agropolitan. Sedangkan pengembangan pariwisata difokuskan terhadap fasilitasi pengembangan objek wisata baru serta pengembangan paket dan event wisata agar terjadi penambahan lama tinggal wisatawan di Banjarnegara.

Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus. Sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian didukung oleh sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan disertai peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.

Perumusan tujuan dan sasaran sebagai turunan dari misi ini mempertimbangkan sasaran pokok misi-misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

➤ Misi 1 :

- Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

➤ Misi 2

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia.
- Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
- Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas.
- Meningkatnya sektor pertanian kearah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
 - Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
 - Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
 - Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
- Misi 4
- Meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean government. Meski demikian, banyaknya permasalahan di bidang keuangan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merasa perlu mengangkat menjadi sebuah misi tersendiri. Diharapkan melalui reformasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Selain itu Pemerintah diharapkan menjadi lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan. Selain itu Pemkab juga akan terus berupaya memantapkan sistem kelembagaan ekonomi daerah, termasuk sistem lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada kegiatan pertanian.

Perumusan tujuan dan sasaran sebagai turunan dari misi ini mempertimbangkan sasaran pokok misi-misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- Misi 3
- Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

Kebutuhan dasar yang terpenuhi selain dikatakan menjadi sejahtera dapat juga meningkatkan kemartabatan masyarakat. Dengan semakin luasnya cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat lebih sejahtera dan bermartabat.

Perumusan tujuan dan sasaran sebagai turunan dari misi ini mempertimbangkan sasaran pokok misi-misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- Misi1 :
- Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).

- Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
 - Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan.
 - Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin.
- Misi 2
- Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas.
 - Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
 - Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
- Misi 4
- Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
 - Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

Selain visi dan misi, terdapat juga tujuan dan sasaran yang merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju program prioritas. Tanpa tujuan dan sasaran maka visi dan misi akan sulit diterjemahkan ke hal yang lebih operasional. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju program prioritas. Tanpa tujuan dan sasaran maka visi dan misi akan sulit diterjemahkan ke hal yang lebih operasional. Tabel berikut ini menggambarkan secara lengkap visi, misi, tujuan, dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Tabel I.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI: "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1.1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
		1.2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdarur atan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%

VISI: "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"						
MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
	1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka
			1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%
2.	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
			2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa			Persentase penetapan APBDes tepat waktu (sebelum 31 Januari)	%
3	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
			3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
	3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
					Nilai Tukar Petani	%
			3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
			3.2.3.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
	Persentase	%				

VISI: "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"							
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN			
			koperasi aktif				
		3.2.4.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%		
		3.2.5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		
		3.2.6.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%		
		3.2.7.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%		
		3.2.8.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%		
				PDRB per kapita	Rupiah		
		3.2.9.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%		
	3.3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	3.3.1.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	
	3.4.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	
4	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	4.1.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini
				4.1.2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%
5	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan	5.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	5.1.1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
				5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%

VISI: "Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN		
Cakupan Pemenuhan Hak Dasar		5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun	
		5.1.4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	
		5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	
		5.2.	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%
			5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%
		Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial				

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

a. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 20'10" - 109° 45'50" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

b. Luas Wilayah

Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 1.149.448.407 m² atau sekitar 3,53 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Secara

administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Luas wilayah dan pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3.
Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Per Kecamatan
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LUAS (m²)	PERSENTASE (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Susukan	53.285.739	4,636
2.	Purwareja Klampok	23.765.838	2,068
3.	Mandiraja	54.481.806	4,740
4.	Purwanegara	81.424.109	7,084
5.	B a w a n g	60.693.583	5,280
6.	Banjarnegara	36.973.352	3,217
7.	Sigaluh	43.434.825	3,779
8.	Madukara	45.993.280	4,001
9.	Banjarmangu	54.415.424	4,734
10.	Wanadadi	29.411.460	2,559
11.	R a k i t	32.938.500	2,866
12.	Punggelan	114.199.229	9,935
13.	Karangkoobar	41.468.280	3,608
14.	Pagentan	50.096.834	4,358
15.	Pejawaran	55.695.324	4,845
16.	B a t u r	50.829.083	4,422
17.	Wanayasa	90.425.138	7,867
18.	Kalibening	91.812.845	7,988
19.	Pandanarum	58.129.946	5,057
20.	Pagedongan	79.973.812	6,958
	JUMLAH	1.149.448.407	100

Sumber Data : BPN/ATR Kab. Banjarnegara 2020

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Punggelan dengan luas mencapai 114.199.229 m² atau sebesar 9,935 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan Purwareja Klampok dengan luas wilayah hanya 23.765.838 m² atau sebesar 2,068 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.

c. Topografis

Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang tersusun mulai dataran rendah, dataran tinggi hingga perbukitan dengan pegunungan landai hingga tinggi dan curam. Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :

- a) Bagian Utara merupakan daerah pegunungan dengan relief bergelombang dan curam, meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu.
- b) Bagian Tengah merupakan wilayah dengan relief datar, merupakan lembah sungai Serayu yang subur, meliputi sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu.
- c) Bagian Selatan merupakan wilayah dengan relief curam. Bagian ini merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan yang meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja dan sebagian Kecamatan Susukan.

Ditinjau dari segi ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 4 (empat) wilayah ketinggian, yaitu :

- a) Kurang dari 100 m dari permukaan laut, meliputi luas 9,82 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan dan Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara dan Bawang.
- b) Antara 100 - 500 m dari permukaan laut, meliputi luas 37,04 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Punggelan, Wanadadi, Rakit Madukara, sebagian Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjarmangu dan Banjarnegara.
- c) Antara 500 - 1.000 m dari permukaan laut, meliputi luas 28,74% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara Pagedongan dan Banjarmangu.
- d) Lebih dari 1.000 m dari permukaan laut, meliputi luas 24,40% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Karangobar dan Pagentan.

Ditinjau dari segi kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a) Antara 0 – 15% meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang dan Rakit.
- b) Diatas 15 – 40% meliputi luas 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangobar, Pagentan, Wanayasa dan Kalibening.
- c) Lebih dari 40% meliputi luas 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur.

Berdasar kemiringan lahan maka ada $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) wilayah Banjarnegara yang memiliki kemiringan lahan di atas 15% yang berpotensi bencana tanah longsor. Data kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.4.
Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020

NO	KEMIRINGAN	LUAS	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	0 – 15 %	24,61 %	Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, Rakit
2.	15 – 40 %	45,04 %	Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangobar, Pagentan, Wanayasa, Kalibening
3.	di atas 40 %	30,35 %	Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pagedongan, Pejawaran, Pandanarum, Batur

Sumber Data : DPUPR Kab. Banjarnegara Tahun 2020

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2020 menurut data yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara hasil rekonsiliasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sejumlah 1.029.728 jiwa, terdiri atas 524.380 jiwa laki-laki dan 505.348 jiwa perempuan.

Jumlah dan kepadatan penduduk secara lengkap Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel I.5.
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	PENDUDUK			
			LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN (JIWA/Km ²)
1	2	3	4	5	6	7
1	Susukan	53,29	32.235	31.644	63.879	1.198,71
2	Pwj Klampok	23,77	24.150	23.872	48.022	2.020,28
3	Mandiraja	54,48	40.128	39.417	79.545	1.460,08
4	Purwanegara	81,42	41.724	41.055	82.779	1.016,69
5	Bawang	60,69	32.531	31.674	64.205	1.057,92

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	PENDUDUK			
			LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN (JIWA/Km ²)
1	2	3	4	5	6	7
6	Banjarnegara	36,97	35.332	34.794	70.127	1.896,84
7	Sigaluh	43,43	16.353	15.966	32.319	744,116
8	Madukara	45,99	23.647	22.678	46.325	1.007,28
9	Banjarmangu	54,42	23.776	22.572	46.348	851,67
10	Wanadadi	29,41	17.382	16.982	34.348	1.168,45
11	Rakit	32,94	27.701	27.020	54.721	1.661,23
12	Punggelan	114,20	45.077	43.026	88.103	771,48
13	Karangkoobar	41,47	16.490	15.363	31.853	768,10
14	Pagentan	50,10	19.769	18.749	38.518	768,82
15	Pejawaran	55,70	23.011	21.417	44.428	797,63
16	Batur	50,83	21.155	19.835	40.990	806,41
17	Wanayasa	90,43	26.061	24.235	50.296	556,48
18	Kalibening	91,81	24.050	22.986	47.036	512,32
19	Pandanarum	58,13	11.872	11.268	23.140	398,07
20	Pagedongan	79,97	21.936	20.795	42.731	534,34
	JUMLAH	1.149,45	524.380	505.348	1.029.728	895,84

Sumber data : Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 adalah berjumlah 1.029.728 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki berjumlah 524.380 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 505.348 jiwa. Jumlah penduduk Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 0,71 % dari jumlah penduduk Banjarnegara tahun 2019.

Angka kepadatan penduduk di dapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk ini menunjukkan berapa jumlah kepadatan penduduk yg mendiami dalam wilayah satu kilometer persegi (km²). Berdasarkan Data Kependudukan tahun 2020 di atas dapat diketahui kepadatan penduduk Banjarnegara adalah 895,84 jiwa/km² yaitu artinya setiap 1 km² wilayah Indonesia dihuni atau ditempati oleh 895,84 orang. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi berdasarkan data diatas dan dapat dimasukkan dalam kategori padat adalah Kecamatan Purwareja

Klampok dengan kepadatan 2.020,28 jiwa/km², kemudian disusul dengan Kecamatan Banjarnegara dengan kepadatan penduduk 1.896,84 jiwa/km².

Sedangkan Struktur penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut kelompok umur Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Umur Tahun 2020

NO	KELOMPOK UMUR (THN)	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	0-4	36.937	35.109	72.046
2	5-9	43.509	40.658	84.167
3	10-14	42.416	40.155	82.571
4	15-19	39.341	37.925	77.266
5	20-24	40.611	38.941	79.552
6	25-29	42.811	40.178	82.989
7	30-34	39.850	37.232	77.082
8	35-39	42.616	40.990	83.606
9	40-44	38.574	36.911	75.485
10	45-49	34.069	34.643	68.712
11	50-54	31.482	31.802	63.284
12	55-59	27.229	28.344	55.573
13	60-64	23.743	23.651	47.394
14	65-69	17.240	15.550	32.790
15	70-74	10.859	10.605	21.464
16	>=75	13.093	12.654	25.747
	JUMLAH	524.380	505.348	1.029.728

Sumber : Dindikcapil Kab. Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut kelompok umur yang terbesar adalah penduduk dengan rentang usia 5-9 dengan jumlah 84.167 jiwa dan disusul dengan penduduk rentang usia 35-39 dengan jumlah 83.606 jiwa sebagai urutan kedua terbesar kemudian untuk urutan ketiga terbesar adalah penduduk rentang usia 25-29 dengan jumlah 82.989 jiwa. Penduduk usia belum produktif di Banjarnegara sangat besar hal ini ditunjukkan dengan penduduk rentang usia 5-9 di Banjarnegara sebagai penduduk jumlah terbesar.

Sedangkan Kabupaten Banjarnegara menurut tingkat pendidikan dari sekolah yang ditamatkan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Tingkat Pendidikan Dari Sekolah Yang Ditamatkan
Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SEKOLAH YANG DITAMATKAN	JUMLAH	
		Tahun 2019	Tahun 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tidak/Belum Sekolah	200.038	207.599
2	Belum Tamat SD	133.594	132.783
3	Tamat SD	386.526	378.642
4	Tamat SLTP	154.075	158.844
5	Tamat SLTA	115.414	118.346
6	Tamat Diploma I/II	4.555	4.346
7	Tamat Diploma III	6.260	6.339
8	Tamat S1	21.167	21.900
9	Tamat S2	827	881
10	Tamat S3	47	48
	JUMLAH	1.022.503	1.029.728

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 penduduk dengan tamatan SD dengan jumlah 378.642 jiwa masih menjadi yang terbesar dalam komposisi penduduk Banjarnegara berdasar sekolah yang ditamatkan kemudian disusul dengan penduduk yang tidak/belum sekolah dengan jumlah 207.599 jiwa.

Penduduk dengan tamatan S1 pada tahun 2020 sebanyak 21.900 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 733 jiwa dibandingkan tahun 2019 yang hanya 21.167 jiwa. Kenaikan juga pada tamatan S2 yang semula pada tahun 2019 sebanyak 827 jiwa bertambah 54 jiwa menjadi 881 jiwa. Sedangkan penduduk dengan tamatan S3 pada tahun 2020 sebanyak 48 jiwa atau bertambah 1 jiwa dibandingkan tahun 2019 sebanyak 47 jiwa.

Perkembangan banyaknya Kepala Keluarga (KK) pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel I.8.
Banyaknya Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Banjarnegara
Per Kecamatan Keadaan Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Susukan	20.661	21.091
2	Purwareja/KLP	16.102	16.234

3	Mandiraja	25.637	26.506
4	Purwanegara	27.886	28.737
5	Bawang	21.329	22.077
6	Banjarnegara	22.567	23.192
7	Sigaluh	10.447	10.642
8	Madukara	15.660	15.619
9	Banjarmangu	15.168	15.895
10	Wanadadi	11.345	11.646
11	Rakit	17.998	18.658
12	Punggelan	28.059	29.597
13	Karangobar	10.192	10.441
14	Pagentan	12.732	13.238
15	Pejawaran	14.267	14.954
16	Batur	13.001	13.368
17	Wanayasa	15.731	16.253
18	Kalibening	14.904	15.374
19	Pandanarum	7.771	7.861
20	Pagedongan	13.875	14.592
J U M L A H		324.861	345.974

Sumber : Dindukcapil Kab. Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, ada penambahan 10.642 KK sepanjang tahun 2020 dari kondisi akhir tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah Kepala Keluarga terbanyak berada di Kecamatan Punggelan dengan jumlah 29.597 KK. Hal ini berbanding lurus dengan besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Punggelan yang menempati urutan pertama jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Jumlah kepala keluarga terbesar kedua berada di Kecamatan Purwanegara dengan jumlah 28.737 KK kemudian disusul oleh Kecamatan Mandiraja dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 26.506 KK.

Penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut Lapangan Pekerjaan Perkembangan kondisi tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Belum/Tidak Bekerja	213.282	220.674
2	Mengurus Rumah Tangga	173.028	175.114
3	Pelajar/ Mahasiswa	137.771	145.734
4	Pensiunan	7.192	6.364

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5	Pegawai Negeri Sipil	9.829	9.510
6	Tentara Nasional Indonesia	548	493
7	Kepolisian RI	591	582
8	Perdagangan	6.354	6.142
9	Petani/ Pekebun	226.454	217.425
10	Peternak	400	372
11	Nelayan Perikanan	79	83
12	Industri	328	301
13	Konstruksi	631	609
14	Transportasi	2.053	1.997
15	Karyawan Swasta	61.397	62.884
16	Karyawan BUMN	834	825
17	Karyawan BUMD	271	265
18	Karyawan Honorer	2.414	2.437
19	Buruh Harian Lepas	43.085	43.788
20	Buruh Tani/Perkebunan	12.534	11.779
21	Buruh Nelayan / Perikanan	55	56
22	Buruh Peternakan	166	160
23	Pembantu Rumah Tangga	2.321	2.060
24	Tukang Cukur	89	84
25	Tukang Listrik	89	88
26	Tukang Batu	3.293	3.199
27	Tukang Kayu	1.949	1.878
28	Tukang Sol Sepatu	26	25
29	Tukang Las / Pandai Besi	179	173
30	Tukang Jahit	891	884
31	Tukang Gigi	18	16
32	Penata Rias	91	91
33	Penata Busana	8	8
34	Penata Rambut	65	58
35	Mekanik	644	646
36	Seniman	69	71
37	Tabib	13	12
38	Paraji	50	45
39	Perancang Busana	1	1

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
40	Penterjemah	2	2
41	Imam Masjid	39	30
42	Pendeta	33	33
43	Pastor	1	1
44	Wartawan	38	37
45	Ustad Mubaligh	147	136
46	Juru Masak	38	35
47	Promotor Acara	2	2
48	Anggota DPR RI	2	-
49	Anggota DPD	-	-
50	Anggota BPK	-	-
51	Presiden	-	-
52	Wakil Presiden	-	-
53	Anggota MK	-	-
54	Anggota Kabinet	-	-
55	Duta Besar	-	-
56	Gubernur	-	-
57	Wakil Gubernur	-	-
58	Bupati	1	1
59	Wakil Bupati	1	1
60	Walikota	-	-
61	Wakil Walikota	-	-
62	Anggota DPRD Provinsi	4	3
63	Anggota DPRD Kabupaten / Kota	40	37
64	Dosen	116	122
65	Guru	5.548	5.562
66	Pilot	2	1
67	Pengacara	13	17
68	Notaris	9	10
69	Arsitek	13	11
70	Akuntan	1	-
71	Konsultan	22	22
72	Dokter	94	101
73	Bidan	442	454
74	Perawat	463	492

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
75	Apoteker	54	61
76	Psikiater Psikolog	-	-
77	Penyiar Televisi	-	-
78	Penyiar Radio	2	2
79	Pelaut	73	75
80	Peneliti	5	5
81	Sopir	4.715	4.749
82	Pialang	3	3
83	Paranormal	9	7
84	Pedagang	34.044	33.035
85	Perangkat Desa	2.792	2.831
86	Kepala Desa	174	221
87	Biarawati	5	5
88	Wiraswasta	42.575	44.575
89	Lainnya	21.889	20.116
	JUMLAH	1.022.503	1.029.728

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Banjarnegara sebagian besar belum bekerja Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk dengan pekerjaan belum bekerja sebagai penduduk terbesar dengan jumlah 220.674 jiwa. Komposisi penduduk berdasar pekerjaan terbesar kedua adalah petani/pekebunan dengan jumlah 217.425 Jiwa, komposisi ketiga adalah penduduk yang bekerja mengurus rumah tangga sebesar 175.114 jiwa kemudian disusul oleh Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 145.734 jiwa.

Keadaan jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan tersebut adalah kondisi nyata berdasarkan kondisi yang tercatat dalam dokumen kependudukan berupa KTP-el maupun KK per tanggal 31 Desember 2020. Memang ada beberapa lapangan pekerjaan yang apabila dicermati belum menunjukkan kondisi ideal seharusnya yang terjadi, karena belum semua penduduk melakukan perubahan / penyesuaian data dalam KTP-el maupun KK sesuai dengan pekerjaan mereka yang terbaru. Salah satunya adalah untuk jenis lapangan pekerjaan Kepala Desa yang seharusnya se-Kabupaten Banjarnegara berjumlah 266 orang namun kenyataannya yang tercatat dalam KTP-el hanya 221 orang. Hal ini boleh jadi dikarenakan belum semua kepala Desa sampai dengan semester I tahun 2020 memperbaharui/merubah jenis pekerjaannya dalam KTP-el maupun KK. Hal yang sama juga terjadi untuk jenis pekerjaan Anggota DPRD maupun PNS.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jumlah penduduk

Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2020 menurut data yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara hasil rekonsiliasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sejumlah 1.029.728 jiwa, terdiri atas 524.380 jiwa laki-laki dan 505.348 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Banjarnegara mengalami peningkatan/ pertumbuhan sejumlah 7.225 jiwa atau sebesar 0,71 % dari jumlah penduduk Banjarnegara tahun 2019 sejumlah 1.022.503 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2019-2020 Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.10.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2019-2020
Kabupaten Banjarnegara

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
1	2	3	4	5	6
1	Susukan	63.758	63.879	121	0,19
2	Pwj Klampok	48.260	48.022	-238	-0,49
3	Mandiraja	78.906	79.545	639	0,81
4	Purwanegara	82.355	82.779	424	0,51
5	Bawang	63.914	64.205	291	0,46
6	Banjarnegara	70.087	70.127	40	0,06
7	Sigaluh	32.275	32.319	44	0,14
8	Madukara	46.879	46.325	-554	-1,18
9	Banjarmangu	45.920	46.348	428	0,93
10	Wanadadi	34.236	34.348	112	0,33
11	Rakit	54.489	54.721	232	0,43
12	Punggelan	87.050	88.103	1.053	1,21
13	Karangkoobar	31.670	31.853	183	0,58
14	Pagentan	37.860	38.518	658	1,74
15	Pejawaran	43.419	44.428	1.009	2,32
16	Batur	40.474	40.990	516	1,27
17	Wanayasa	49.144	50.296	1.152	2,34
18	Kalibening	46.544	47.036	492	1,06
19	Pandanarum	23.188	23.140	-48	-0,21
20	Pagedongan	42.075	42.731	656	1,56
Kabupaten Banjarnegara		1.022.503	1.029.728	7.225	0,71

Sumber data : Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

4. Jumlah PNS

Jumlah pegawai pemerintah/PNS yang bekerja di Kabupaten Banjarnegara (baik yang ber KTP-el Banjarnegara maupun di luar Banjarnegara) per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak **7.716** orang yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.11.
Jumlah PNS Di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	72	37	109
2	Sekretariat DPRD	31	9	40
3	Inspektorat	20	17	37
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.018	2.679	4.697
5	Dinas Kesehatan	288	841	1.129
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104	11	115
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	104	10	114
8	Satuan Polisi Pamong Praja	39	5	44
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24	17	41
10	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26	11	37
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	11	30
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28	20	48
13	Dinas Perhubungan	44	3	47
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	7	30
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20	18	38
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	49	13	62
17	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	106	46	152
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	88	15	103
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan	26	11	37

NO	PERANGKAT DAERAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	Pengembangan			
20	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	41	25	66
21	Badan Kepegawaian Daerah	22	15	37
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	3	10
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	4	17
24	Rumah Sakit Umum Daerah	109	163	272
25	Kecamatan Bawang	8	6	14
26	Kecamatan Mandiraja	12	5	17
27	Kecamatan Banjarnegara	36	44	80
28	Kecamatan Sigaluh	19	5	24
29	Kecamatan Madukara	18	9	27
30	Kecamatan Banjarmangu	11	5	16
31	Kecamatan Wanadadi	11	4	15
32	Kecamatan Rakit	13	2	15
33	Kecamatan Punggelan	15	3	18
34	Kecamatan Karangkoobar	11	4	15
35	Kecamatan Pagentan	14	4	18
36	Kecamatan Pejawaran	12	3	15
37	Kecamatan Batur	13	4	17
38	Kecamatan Wanayasa	9	5	14
39	Kecamatan Kalibening	9	4	13
40	Kecamatan Pandanarum	15	2	17
41	Kecamatan Pagedongan	12	4	16
42	Kecamatan Purwanegara	14	3	17
43	Kecamatan Purwareja Klampok	17	1	18
44	Kecamatan Susukan	15	3	18
	Jumlah	3.605	4.111	7.716

Sumber Data: BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Dindikpora Kabupaten Banjarnegara menjadi SKPD/OPD yang memiliki jumlah PNS terbanyak yakni sejumlah 4.697 PNS atau sekitar 60,87 % dari total PNS di Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah **7.716** PNS. Sedangkan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara menjadi SKPD/OPD dengan jumlah PNS terbanyak berikutnya yakni sejumlah 1.129 PNS atau sekitar 14,63 % dari total PNS di Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan jumlah PNS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 apabila dirinci berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel I.12.
Jumlah PNS Di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang
Tahun 2020

NO	PANGKAT	GOL RUANG	JUMLAH
1	2	3	4
1	Juru Muda	I/a	1
2	Juru Muda Tk.I	I/b	7
3	Juru	I/c	78
4	Juru Tk. I	I/d	109
5	Pengatur Muda	II/a	83
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	296
7	Pengatur	II/c	670
8	Pengatur Tk. I	II/d	336
9	Penata Muda	III/a	808
10	Penata Muda Tk. I	III/b	1.398
11	Penata	III/c	857
12	Penata Tk. I	III/d	760
13	Pembina	IV/a	2.065
14	Pembina Tk. I	IV/b	234
15	Pembina Utama Muda	IV/c	11
16	Pembina Utama Madya	IV/d	3
17	Pembina Utama	IV/e	0
JUMLAH			7.716

Sumber Data: BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 PNS dengan Pangkat Pembina atau golongan IV/a menjadi yang terbanyak sejumlah 2.065 orang. Disusul PNS dengan pangkat Penata Muda Tk. I atau Golongan III/b sejumlah 1.398 orang. Sedangkan PNS dengan pangkat Pembina Utama Muda atau Golongan IV/d menjadi yang paling sedikit yakni sejumlah 3 orang. Dan PNS dengan pangkat Juru Muda atau golongan I/a sejumlah 1 orang PNS.

Sedangkan Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel I.13.
Jumlah PNS Di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PROSENTASE (%)
1	2	3	4
1	S3	1	0,013

2	S2	218	2,825
3	S1	4.819	62,455
4	DIV	100	1,296
5	DIII	930	12,053
6	DII	260	3,370
7	DI	26	0,337
8	SLTA	1.083	14,036
9	SLTP	213	2,760
10	SD	66	0,855
JUMLAH		7.716	100.00

Sumber Data: BKD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 yang terbanyak adalah berpendidikan S1 yakni sejumlah 4.819 PNS atau mencapai 62,455 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang terbanyak selanjutnya adalah berpendidikan SLTA yakni sebanyak 1.083 PNS atau mencapai 14,036 % dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Dengan kekuatan PNS sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 telah menghasilkan capaian kinerja pembangunan di berbagai urusan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai penambah ekuitas daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Termasuk pendapatan daerah adalah pendapatan yang diterima melalui Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dan Puskesmas serta Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk juga pendapatan yang diterima melalui Bendahara Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri dan SD Negeri.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Daerah merupakan ukuran kemampuan daerah di dalam membiayai belanja maupun pembiayaan, baik yang bersifat wajib maupun Pilihan dan Penunjang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang maupun peraturan/ketentuan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan baik untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun maupun Tahunan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, strategi dan upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan dalam mencapai target Pendapatan Daerah Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan daerah lainnya yang sah;

- b) Meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak;
- c) Memperbaiki sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
- e) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- f) Meningkatkan kesehatan dan peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
- g) Meningkatkan komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- h) Meningkatkan deviden dari BUMD dan perusahaan yang terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- i) Menerapkan Perda Retribusi Parkir;
- j) Mendorong PLN untuk memanfaatkan database PJU dan MoU Penerangan Jalan; dan
- k) Penggunaan tapping tools dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah

Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah **Rp.2.029.074.762.532,-** tercapai realisasinya sejumlah **Rp.1.994.340.529.611,-** atau **98,29%**, mengalami penurunan sejumlah **Rp.111.649.742.726,-** atau **5,302 %** dibandingkan realisasi Tahun 2019.

Tabel I.14.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	236.466.681.466,-	238.638.822.734,-	100,92	257.700.650.110,-	(7,397)
2	Dana Perimbangan	1.267.999.394.588,-	1.238.071.740.603,-	98,17	1.345.282.274.537,-	(7,969)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	524.608.686.478,-	517.629.966.274,00	93,19	503.007.347.690,-	2,907
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.029.074.762.532,-	1.994.340.529.611,-	98,29	2.105.990.272.337,-	(5,302)

*Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)*

Dari Tabel di atas tampak bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan atau hanya mencapai 98,29%. Demikian juga manakala dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi pendapatan 2020 juga mengalami penurunan sejumlah Rp.111.649.742.726,- atau 5,302 %.

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah

Rp.236.466.681.466,- terealisasi sejumlah Rp.238.638.822.734,- atau 100,92%. Namun, realisasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang terealisasi Rp.257.700.650.110,-. Realisasi PAD 2020 berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 11,97 %,,. Adapun rincian realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel I.15.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
TA.2020 dan TA.2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Pajak Daerah	54.492.788.000,-	55.447.395.349,-	101,75	60.732.283.268,-	(8,70)
2	Hasil Retribusi Daerah	15.895.336.019,-	16.589.489.104,-	104,37	21.457.325.417,-	(22,68)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.290.372.635,-	15.290.379.441,-	98,17	17.091.096.087,-	(10,54)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	150.788.184.812,-	151.311.558.840,-	93,19	158.419.945.338,-	(4,49)
	Jumlah Pendapatan Daerah	236.466.681.466,-	238.638.822.734,-	93,19	257.700.650.110,-	(7,40)

*Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)*

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah Rp.54.492.788.000,- terealisasi sejumlah Rp.55.447.395.349,- atau 101,75 %, dibandingkan Tahun Anggaran 2019 terdapat penurunan sejumlah Rp.5.284.887.919,- atau 8,70 %. Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel I.16.
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	325.000.000,-	346.565.247,-	106,64	502.314.095,-	(31,01)
2	Pajak Restoran	3.203.067.000,-	3.320.308.878,-	103,66	4.943.800.998,-	(32,84)
3	Pajak Hiburan	133.102.000,-	103.188.341,-	77,53	277.256.950,-	(62,78)
4	Pajak Reklame	716.119.000,-	865.897.408,-	120,92	668.228.623,-	29,58
5	Pajak Penerangan	19.750.000.000,-	19.824.966.103,-	100,38	22.152.042.539,-	(10,51)

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Jalan					
6	Pajak Parkir	250.000.000,-	224.005.020,-	89,60	257.223.440,-	(12,91)
7	Pajak Air Tanah	400.000.000,-	492.744.910,-	123,19	437.301.962,-	12,68
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.500.000,-	4.300.000,-	122,86	3.600.000,-	19,44
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.812.000.000,-	2.007.287.604,-	71,38	3.961.571.845,-	(49,33)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.500.000.000,-	24.102.353.851,-	102,56	22.833.280.607,-	5,56
11	Pajak BPHTB	3.400.000.000,-	4.155.777.987,-	122,23	4.695.662.209,-	(11,50)
	Jumlah Pajak Daerah	54.492.788.000,-	55.447.395.349,-	101,75	60.732.283.268,-	(8,70)

*Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)*

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.15.895.336.019,- terealisasi sejumlah Rp.16.589.489.104,- atau 104,37 % mengalami penurunan sejumlah Rp.4.867.836.313,- atau 22,695 % dibanding tahun 2019. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.

**Tabel I.17.
Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2020 dan 2019**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Jasa Umum	4.160.662.071,-	4.951.735.452,-	119,01	5.676.729.509,-	(12,77)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	370.200.900,-	452.994.900,-	122,36	500.866.800,-	(9,56)
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	452.708.997,-	452.745.140,-	100,01	554.355.000,-	(18,33)
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.664.401.969,-	3.013.478.000,-	113,10	3.465.322.900,-	(13,04)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	445.440.000,-	563.995.000,-	126,62	710.526.000,-	(20,62)
	Pengendalian Menara Telekomunikasi	227.910.205,-	468.522.412,-	205,57	445.658.809,-	5,13
2	Retribusi Jasa Usaha	11.224.673.948,-	11.018.008.108,-	98,16	15.259.424.932,-	(27,80)

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.419.364.448,-	1.810.989.608,-	127,59	1.351.910.432,-	33,96
	Retribusi Terminal	301.231.500,-	325.206.000,-	107,96	365.853.500,-	(11,11)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	204.650.000,-	198.640.500,-	97,06	263.550.000,-	(24,63)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	74.928.000,-	76.923.000,-	102,66	79.317.000,-	(3,02)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.975.000.000,-	8.379.243.000,-	93,36	12.969.890.000,-	(35,39)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	249.500.000,-	227.006.000,-	90,98	228.904.000,-	(0,83)
	Retribusi Perizinan Tertentu	510.000.000,-	619.745.544,-	121,52	521.170.976,-	18,91
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000,-	579.420.544,-	128,76	440.303.476,-	31,60
	Retribusi Izin Gangguan	0,-	0,-	0	2.282.500,-	(100,00)
	Retribusi Izin Trayek	60.000.000,-	40.325.000,-	67,21	78.585.000,-	(48,69)
	Jumlah Retribusi Daerah	15.895.336.019,-	16.589.489.104,-	104,37	21.457.325.417,-	(22,69)

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang berupa dividen/bagian laba perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditargetkan sejumlah Rp.15.290.372.635,- terealisasi sejumlah Rp.15.290.379.441,- atau 100 %. Realisasi tersebut mengalami penurunan sejumlah Rp.1.800.716.646,- atau 10,54 %. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel I.18.
Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perusahaan Daerah BPR/BKK	609.111.284,-	609.111.284,-	100,00	2.151.272.094,-	(71,69)

	Mandiraja					
2	Perusahaan Daerah Percetakan Karya Praja	57.378.829,-	57.378.829,-	100,00	56.798.024,-	1,02
3	Perusahaan Daerah Pertambangan	0,-	0,-	0	39.034.897,-	(100,00)
4	Bank Jawa Tengah	14.160.259.523,-	14.160.259.523,-	100,00	14.392.103.443,-	(1,61)
5	Perumda TRMS Serulingmas	461.358.316,-	461.358.316,-	100,00	451.887.629,-	2,10
6	PT PRPP	2.264.683,-	2.271.489,-	100,30	0,-	NA
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.290.372.635,-	15.290.379.441,-	100,00	17.091.096.087,-	(10,54)

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sejumlah Rp.150.788.184.812,- dan terealisasi Rp.151.311.558.840,- atau 100,35 %. Realisasi tersebut mengalami penurunan Rp.7.108.386.498,- dibanding Tahun 2019 atau 4,49 %. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:

Tabel I.19.
Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	937.000.000,-	522.215.855,-	55,73	1.013.871.111,-	(48,49)
2	Penerimaan Jasa Giro	3.222.923.446,-	2.583.487.323,-	80,16	4.219.038.252,-	(38,77)
3	Penerimaan Bunga Deposito	4.500.000.000,-	2.748.972.592,-	61,09	8.032.714.494,-	(65,78)
4	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (TGR)	4.141.100,-	8.141.100,-	196,59	21.450.000,-	(62,05)
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,-	121.761.422,-	24,35	1.785.405.238,-	(93,18)
6	Pendapatan Denda Pajak	57.192.206,-	71.590.489,-	125,18	171.070.309,-	(58,15)
7	Pendapatan Denda Retribusi	6.498.194,-	25.438.294,-	391,47	22.372.425,-	13,70
8	Pendapatan dari Pengembalian	240.019.992,-	445.040.521,-	185,42	872.742.309,-	(49,01)
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	52.500.000,-	63.231.270,-	120,44	109.285.528,-	(42,14)
10	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	68.168.046,-	239.145.406,-	350,82	48.705.722,-	391,00
11	Hasil dari Pemanfaatan	1.250.999.034,-	1.427.707.616,-	114,13	1.650.861.031,-	(13,52)

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Kekayaan Daerah					
12	Pendapatan BLUD	139.948.742.794,-	143.054.826.952,-	102,22	138.746.378.899,-	3,11
13	Pendapatan dari pihak ketiga- PLMTH	0,-	0,-	0,00	1.389.167.354,-	(100,00)
14	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,-	0,-	0,00	4.500.000,-	(100,00)
15	Pendapatan Klaim Asuransi	0,-	0,-	0,00	332.382.666,-	(100,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	150.788.184.812,-	151.311.558.840,-	100,35	158.419.945.338,-	(4,49)

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah Rp.1.267.999.394.588,-, terealisasi sebesar Rp.1.238.071.740.60,- atau 97,64 %. Kontribusinya terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar 62,080 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat kenaikan sejumlah Rp.107.210.533.934,- atau 7,97 %. Adapun rincian realisasi Dana Perimbangan sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel I.20.
Target Dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	40.031.968.010,-	32.994.964.981,-	82,42	22.981.870.648,-	43,57
a	Bagi Hasil Pajak	37.263.855.101,-	31.166.295.087,-	83,64%	21.670.909.597,-	43,82
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	12.246.914.748,-	7.218.837.347,-	58,94	8.246.900.495,-	(12,47)
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Psl 25 dan Psl 29 dan Psl 21	18.158.793.509,-	17.588.135.724,-	96,86	6.725.628.122,-	161,51
	Bagi Hasil Cukai Tembakau	6.858.146.844,-	6.359.322.016,-	92,73	6.698.380.980,-	(5,06)
b	Bagi Hasil Bukan Pajak /	2.768.112.909,-	1.828.669.894,-	66,06	1.310.961.051,-	39,49

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Sumber Daya Alam					
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	522.892.857,-	233.152.086,-	44,59	165.736.200,-	40,68
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.647.661.150,-	788.276.289,-	47,84	590.155.800,-	33,57
	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	26.658.000,-	56.090.685,-	210,41	95.052.100,-	(40,99)
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	80.524.900,-	711.359.243,-	883,40	419.934.900,-	69,40
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	489.495.217,-	38.123.288,-	7,79	39.944.151,-	(4,56)
	Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	880.785,-	1.668.303,-	189,41	137.900,-	1.109,79
2	Dana Alokasi Umum	914.958.948.000,-	900.564.784.000,-	98,43	999.003.344.000,-	(9,85)
	Dana Alokasi Umum	914.958.948.000,-	900.564.784.000,-	98,43	999.003.344.000,-	(9,85)
3	Dana Alokasi Khusus	313.008.478.578,-	304.512.531.622,-	97,29	323.297.059.889,-	(5,81)
a	Dana Alokasi Khusus Fisik	69.284.295.000,-	63.858.056.300,-	92,17	98.335.630.759,-	(35,06)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	12.292.817.000,-	12.036.511.506,-	97,91	18.723.573.600,-0	(35,71)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	0,-	0,-		23.908.802.000,-	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	31.931.651.000,-	29.112.453.633,-	91,17	23.748.344.867,-	22,59
	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	0,-	0,-		726.864.000,-	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	666.946.000,-	638.733.000,-	95,77	3.510.936.000,-	(81,81)
	Dana Alokasi Khusus Irigasi	4.430.855.000,-	3.457.083.000,-	78,02	3.050.003.600,-	13,35
	Dana Alokasi Khusus Air Minum	2.424.635.000,-	1.991.524.373,-	82,14	2.030.482.652,-	(1,92)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	908.897.000,-	903.735.000,-	99,43	761.531.500,-	18,67
	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sanitasi	1.250.000.000,-	1.244.000.000,-	99,52	5.959.524.000,-	(79,13)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	1.162.802.000,-	968.517.000,-	83,29	4.143.546.600,-	(76,63)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.545.382.000,-	2.531.282.000,-	99,45	3.123.750.000,-	(18,97)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	5.368.480.000,-	5.054.907.860,-	94,16	3.707.734.250,-	36,33
	Dana Alokasi Khusus	858.632.000,-	647.385.800,-	75,40	858.604.320,-	(24,60)

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Penurunan Stunting					
	Dana Alokasi Khusus Pengendalian Penyakit	4.491.198.000,-	4.319.923.128,-	96,19	4.081.933.370,-	5,83
	Dana Alokasi Khusus Pengendalian Bidang Sosial	952.000.000,-	952.000.000,-	100,00	0,-	NA
b	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	243.724.183.578,-	240.654.475.322,-	98,74	224.961.429.130,-	6,98
	Bantuan Operasional Kesehatan	41.041.400.578,-	41.041.400.578,-	100,00	23.091.960.435,-	77,73
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.644.948.000,-	4.267.630.100,-	75,60	2.800.256.449,-	52,40
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	14.718.000.000,-	14.588.127.000,-	99,12%	13.419.931.000,-	8,70
	Jaminan Persalinan	3.412.381.000,-	3.412.381.000,-	100,00	0,-	NA
	Akreditasi Puskesmas	1.950.810.000,-	1.950.810.000,-	100,00	0,-	NA
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	168.750.474.000,-	168.750.474.000,-	100,00	177.710.365.240,-	(5,04)
	Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.591.554.000,-	2.591.554.000,-	100,00	1.024.283.000,-	153,01
	Pelayanan Kependudukan	2.072.475.000,-	2.001.895.644,-	96,59	1.756.195.006,-	13,99
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.966.700.000,-	1.518.250.000,-	51,18	4.245.400.000,-	(64,24)
	Dana Layanan Pariwisata	344.050.000,-	300.022.000,-	87,20	913.038.000,-	(67,14)
	Pengawasan Obat dan Makanan	231.391.000,-	231.931.000,-	100,23		
	Jumlah Dana Perimbangan	1.267.999.394.588,-	1.238.072.280.603,-	97,64	1.345.282.274.537,-	(7,97)

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian, Bantuan keuangan provinsi dan dana desa , serta bonus produksi perusahaan panas bumi.

Pendapatan ini ditargetkan sejumlah Rp.524.608.686.478,- dan terealisasi Rp.567.142.041.157,- atau 108,11 %. Realisasi pendapatan ini meningkat sejumlah Rp.64.134.693.467,- atau 12,75 % dibanding dengan realisasi Tahun 2019.

Tabel I.21.
Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Hibah	106.470.295.478,-	106.369.436.325,-	99,91	94.454.578.127,-	12,61
a	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	106.325.001.125,-	106.369.436.325,-	100,04	94.454.578.127,-	12,61
	Pendapatan Hibah Dana BOS	104.023.248.325,-	103.981.440.000,-	99,96	93.146.520.000,-	11,63
	Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-	100,00	1.000.000.000,-	100,00
	Pendapatan Hibah IPDMIP	292.752.800,-	387.996.325,-	132,53	308.058.127,-	25,95
	Pendapatan Hibah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	9.000.000,-	0,-	0,00	0,00	0,00
b	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	145.294.353,-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.589.682.000,-	151.973.120.906,-	141,25	107.283.576.666,-	41,66
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.766.989.000,-	21.268.521.936,-	97,71	25.277.805.961,-	(15,86)
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.557.814.000,-	11.282.396.705,-	54,88	18.422.694.882,-	(38,76)
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.251.883.000,-	18.364.258.405,-	78,98	25.647.171.706,-	(28,40)
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.401.520.000,-	50.528.971.930,-	3.605,30	1.187.634.586,-	4.154,59
	Bagi Hasil Pajak Rokok	40.611.476.000,-	50.528.971.930,-	124,42	36.748.269.531,-	37,50
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.668.112.000,-	26.668.112.000,-	100,00	23.796.747.000,-	12,07
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.847.000.000,-	16.193.248.000,-	96,12	14.817.984.897,-	9,28
5	Pendapatan	705.000.000,-	0,-	0,00	0,-	

NO	URAIAN	TARGET TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Lainnya					
6	Dana Desa	265.128.597.000,-	265.128.597.000,-	100,00	262.654.461.000,-	0,94
7	Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	1.200.000.000,-	809.526.926,-	67,46	0,-	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	524.608.686.478,-	567.142.041.157,-	108,11	503.007.347.690,-	12,75

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan serta penunjang. Belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan parpol, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pemenuhan komponen Belanja Tidak Langsung tersebut diutamakan pada pemenuhan belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan parpol, dimana ketiga komponen tersebut merupakan belanja wajib serta mengikat. Setelah itu, menyusul komponen belanja bantuan sosial yang digunakan untuk memperluas cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat. Bantuan hibah menjadi prioritas berikutnya, diikuti oleh belanja tak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung target capaian 56 prioritas pembangunan nasional Tahun 2020, dan mencapai target-target pembangunan daerah.

Prioritas belanja langsung didasarkan pada prioritas dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2020, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta sinkronisasi prioritas dan arah kebijakan antara pusat dan daerah.

Sesuai RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 prioritas Belanja Langsung diarahkan pada:

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah;
2. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berbasis pada potensi unggulan daerah;
3. Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar.

Belanja Daerah Tahun 2020 dianggarkan sejumlah **Rp.2.106.432.380.778,-** terealisasi **Rp.2.030.481.643.319,-** atau 96,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, belanja daerah menurun sejumlah Rp.92.552.154.112,- atau 4,36%

Tabel I.22.
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung	1.249.508.981.939,-	1.220.669.474.350,-	97,69	1.269.563.421.639,-	(3,85)
	Belanja Pegawai	786.373.368.433,-	761.317.422.947,-	96,81	814.306.718.615,-	(6,51)
	Belanja Hibah	31.329.700.000,-	30.246.917.201,-	96,54	44.958.597.794,-	(32,72)
	Belanja Bantuan Sosial	6.450.000.000,-	6.124.878.935,-	94,96	18.265.651.000,-	(66,47)
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.826.040.250,-	11.714.442.000,-	99,06	10.854.531.000,-	7,92
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	373.670.995.756,-	373.670.995.400,-	100,00	379.364.226.401,-	(1,50)
	Belanja Tak Terduga	39.858.877.500,-	37.594.817.867,-	94,32	1.813.696.829,-	1.972,83
2	Belanja Langsung	856.923.398.839,-	809.812.168.969,-	94,50	853.470.375.792,-	(5,12)
	Belanja Pegawai	68.207.036.558,-	66.839.282.381,-	97,99	67.782.303.133,-	(1,39)
	Belanja Barang dan Jasa	427.424.558.320,-	394.467.636.879,-	92,29	427.482.543.857,-	(7,72)
	Belanja Modal	361.291.803.961,-	348.505.249.709,-	96,46	358.205.528.802,-	(2,71)
	Jumlah Belanja	2.106.432.380.778,-	2.030.481.643.319,-	96,39	2.123.033.797.431,-	(4,36)

*Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)*

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah netto dianggarkan sejumlah Rp.77.357.618.246,-.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitunganyang cermat dan rasional. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 alokasi dianggarkan sejumlah Rp.88.257.618.246,- terealisasi sejumlah Rp.88.211.343.324,- atau 99,95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, terdapat penurunan sejumlah Rp.28.739.800.016,- atau 24,57 %.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.10.900.000.000,- terealisasi sejumlah Rp.10.900.000.000,- atau 100 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, terdapat penurunan sejumlah Rp.850.000.000,- atau 7,23 %.

Secara keseluruhan, realisasi Total Pembiayaan Netto pada tahun 2020 lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 26,51 %. Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel I.23.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	REALISASI			% Kenaikan/ (penurunan) dari realisasi 2019
			TA. 2020 (Rp)	%	TA. 2019 AUDITED (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Pembiayaan	88.257.618.246,-	88.211.343.324,-	99,95	116.951.143.340,-	(24,57)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	88.157.618.246,-	88.157.618.246,-	100,00	116.906.522.531,-	(24,59)
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,-	53.725.078,-	53,73	44.620.809,-	20,40
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.900.000.000,-	10.900.000.000,	100,00	11.750.000.000,-	(7,23)
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.900.000.000,-	10.900.000.000,-	100,00	11.750.000.000,-	(7,23)
3	Pembiayaan Netto	77.357.618.246,-	77.311.343.324,-	99,94	105.201.143.340,-	(26,51)

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 (Unaudited)